

DINAS SOSIAL KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA (RENJA)



2018

Sekretariat :

Jl. Andalas No. 49 Telp./Fax. 0481-21029

Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat 92732

Watamponè Kabupatèn Bonè Sulawesi Selatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT. karena atas rahmat dan karunia-Nya serta tuntunan-Nya sehingga penyusunan **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat terselesaikan. Hal ini sebagai suatu langkah awal untuk mewujudkan penyelenggaraan Good Governance dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Bone merupakan kebijakan public mengenai sistem perencanaan dibidang kesejahteraan sosial serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA - SKPD dan selanjutnya menjadi DPA - SKPD karena memuat arah kebijakan pembangunan tahun berikutnya dengan berpedoman pada Visi Dinas Sosial Kabupaten Bone yakni **“Terwujudnya Pembangunan yang ber-Kesejahteraan Sosial, Berkeadilan dan Berkelanjutan.”**

Kiranya keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan tugas-tugas dibidang Kesejahteraan Sosial yang dimaksud melalui **Rencana Kerja (RENJA)** Dinas Sosial Kabupaten Bone kiranya dapat menjadi nilai tambah dan pembelajaran dalam meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya dan dapat membenahi kekurangan yang ada untuk menyusun dokumen yang lebih baik lagi.

Watampone, 27 Maret 2017

Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Bone,



Drs. ANDI RUSLAN, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19590723 198603 1 017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	4
D. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU	
A. Tahun 2013	8
B. Tahun 2014	10
C. Tahun 2015.....	12
D. Tahun 2016.....	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN	
A. Tujuan	17
B. Sasaran	17
C. Program	17
D. Kegiatan	18
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD	20
BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJUBERDASARKAN PAGU INDIKATIF	23
BAB VI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN	27
BAB VII PENUTUP	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	
- Rekapitulasi Bahan Forum SKPD yang bersumber dari Usulan Prioritas Musrenbang Kecamatan Tahun 2017 Perencanaan 2018	

BAB I

PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Proses pemerintahan kian tahun kian mengalami perkembangan. Perubahan paradigma pemerintahan yang baru yang kian menuntut kinerja aparatur yang transparan, akuntabel demi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good government*), serta Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) . Perkembangan pemerintahan yang kian terus berpacu menuntut Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kinerjanya. Kinerja harus dimulai dari sistem perencanaan yang baik, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pada tingkat pengawasan berupa monitoring dan evaluasi.

Paradigma pemerintahan yang lama hanya menitikberatkan sistem pengawasan (monitoring dan evaluasi) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, tetapi sekarang aparatur mulai dievaluasi mulai dari sistem perencanaan sampai pada tahap akhir pelaksanaan kegiatan, termasuk sistem penganggaran. Sehingga dalam rangka untuk mencapai keberhasilan dalam pencapaian tujuan, maka dibutuhkan sebuah proses perencanaan yang matang.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun ditetapkan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD.

Dalam sebuah Instansi Pemerintahan, setiap perencanaan dituangkan dalam sebuah Rencana Kerja (RENJA). Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu

perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya atas penjabaran Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan penjabaran dari rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja yang dilakukan oleh SKPD harus diselaraskan dengan RTRW Kabupaten Bone Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Serta Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone karena Renja merupakan penjabaran Renstra yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang secara teknis dilakukan oleh SKPD teknis masing-masing, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Bone.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengahDaerah. Penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagai berikut :

- Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.
- Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilingkungan Satuan Kerja Perangkant Daerah (SKPD).
- Pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

- **Landasan Hukum**

Pada dasarnya Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya suatu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (Amnibus Regulation) dari berbagai Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
7. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Inpres 9 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG)
11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) Tahun 2010-2014.
12. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 – 2032.
18. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2013 tentang Rencana Strategis Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2018.
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
20. Peraturan Bupati Bone Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone.
21. Peraturan Bupati Bone Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2018
22. Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bone Nomor Tahun 2018 tentang Penetapan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun 2013-2018;

- Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) dan

capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan tujuannya yaitu harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan anggaran satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggaraan negara berkewajiban untuk bertanggungjawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dananya.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Tahun 2013-2018 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone Tahun 2018. Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Renja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kab. Bone.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategi & kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 guna mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

VISI: “TERWUJUDNYA PEMBANGUNANYANG BER-KESEJAHTERAAN SOSIAL, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”

Untuk merealisasikan visi dan memberikan arahan tentang tujuan yang akan diwujudkan serta untuk memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan dan untuk memanfaatkan etos kerja serta untuk memberikan gambaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Bone ditetapkan Misi sebagai berikut :

MISI :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Kesejahteraan Sosial.

- 2. Meningkatkan Harkat dan Martabat serta Kualitas Hidup Manusia.**
- 3. Mencegah, Mengendalikan dan Mengatasi Permasalahan Kesejahteraan Sosial.**
- 4. Memelihara, Memperkuat Stabilisasi Sosial dan Integrasi Sosial melalui Usaha-Usaha Memperkecil Kesenjangan Sosial.**
- 5. Mengembangkan Prakarsa dan Peran Aktif Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Kesejahteraan dengan Melibatkan Unsur-Unsur Tokoh Masyarakat, Pemuda, Karang Taruna, PSM/TKSM dan ORSOS/LSM yang Bergerak dalam Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.**
- 6. Melestarikan Nilai-Nilai Semangat Juang, Keperintisan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial.**

Visi dan Misi tersebut di atas mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018. Hal ini merupakan bentuk sinkronisasi dokumen perencanaan yang diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi Pembangunan oleh Bupati Bone terpilih sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018, yaitu :

“MASYARAKAT BONE YANG SEHAT, CERDAS DAN SEJAHTERA”

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2018 sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-SKPD) Dinas Sosial Kab. Bone pada Tahun 2018,
2. Menetapkan target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2018,
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta Pagu Anggaran Dinas Sosial Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2018.

- Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2018.

Bab 2 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Menyajikan uraian tentang evaluasi pencapaian kinerja terhadap target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Bone pada tahun sebelumnya.

Bab 3 Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran yang Menggambarkan Pencapaian Renstra

Menyajikan uraian tentang evaluasi capaian kinerja terhadap target kinerja yang tertuang dalam Renstra Dinas Sosial Kab. Bone Tahun 2013-2018, analisis pencapaian kinerja hingga tahun sebelumnya, beserta isu strategis terkait tugas dan fungsi Dinas Sosial Kab. Bone disertai Penelaahan atas Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab 4 Dana Indikatif beserta Sumbernya serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif

Memuat rumusan tentang Tujuan dan Sasaran beserta Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 disertai dengan penyajian dana indikatif beserta sumbernya dan prakiraan maju tahun berikutnya, termasuk telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Bab 5 Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program dan Kegiatan

Menyajikan sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Bab 6 Penutup

Menyajikan Kesimpulan dan Harapan atas Rencana Kerja Dinas Sosial Kab. Bone pada Tahun 2018.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

Untuk menjamin pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2018 yang berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi juga dimaksudkan guna menjaga kesinambungan dan sekaligus melihat secara realita program yang bermanfaat dan efektif kepada masyarakat dan menjadi acuan pertimbangan bagi program kegiatan yang tak terealisasi dalam upaya penyusunan Program dan Kegiatan berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja atas tujuh (7) sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Inspektur Daerah Kab. dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

Berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas, maka evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun lalu adalah sebagai berikut :

1. Tahun 2013

Pada tahun 2013, Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan disahkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2013, maka Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dapat dilihat sebagai berikut :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin - Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin 	40 Orang (4 Kelompok)	20 %
2. Pendataan PMKS dan PSKS	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Perangkat Komputer, Tenaga Pendata. - Keluaran = Terdatanya para PMKS dan PSKS - Hasil = Tersedianya data para PMKS dan PSKS 	27 Kecamatan	30 %
3. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Terbina dan Terlatihnya Anak Terlantar. - Hasil = Meningkatnya Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 	15 Orang APS/AT	100 %
4. Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana - Keluaran = Para Penyandang Cacat dapat Berdayaguna. - Hasil = Meningkatnya Kemandirian dan Kualitas Hidup para Penyandang Cacat 	7 Orang Penyandang Cacat (PACA)	100 %
5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Petugas Kebersihan/Tukang Cat - Keluaran = Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharadengan baik. - Hasil = Meningkatnya Penghargaan kepada para Pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan. 	1 Unit TMP	100 %
6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone. (Belanja Modal)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Petugas Kebersihan/Tukang Cat - Keluaran = Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharadengan baik. - Hasil = Meningkatnya Penghargaan kepada para Pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan. 	1 Unit TMP	99 %
7. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Karang Taruna/Orsos - Keluaran = Terciptanya Karang Taruna yang Trampil dan Mandiri. - Hasil = Meningkatnya Keterampilan Karang Taruna. 	2 Karang Taruna	100 %

8. Bimbingan dan Pelatihan Spesifikasi Shelter dan Dapur Umum Tagana	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan =Dana, Instruktur, Pakaian Kerja Lapangan - Keluaran =Terciptanya KarangTaruna yang Trampil dan Mandiri. - Hasil = Meningkatnya Keterampilan Karang Taruna. 	100 Orang anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	98 %
--	---	---	------

BerdasarkanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Bone pada Tahun 2013, capaian kinerjanya adalah **84,25%** dari semua kegiatan maka pelaksanaan Program dan Kegiatan masih dapat dikatakan **berhasil**.

2. Tahun 2014

Sedangkan pada tahun 2014, Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan disahkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2014, maka Program dan Kegiatan yang menjadi skala prioritas dapat dilihat sebagai berikut :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin - Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin 	6 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 100 %
2. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Berkurangnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bone - Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bone 	10 Kecamatan 100 %
3. Pendataan PMKS dan PSKS	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Perangkat Komputer, Tenaga Pendata. - Keluaran = Terdatanya para PMKS dan PSKS - Hasil = Tersedianya data para PMKS dan PSKS 	27 Kecamatan 100 %

4. Penanganan Masalah – Masalah yang menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Mobil Operasional, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) - Keluaran = Tertanganinya orang/masyarakat yang terkena bencana secara maksimal - Hasil = Tertanggulangnya Masyarakat yang terkena bencana 	Daerah yang terkena Bencana	90 %
5. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran= Terbina dan Terlatihnya Anak Terlantar. - Hasil = Meningkatnya Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 	5 Paket Keterampilan	100 %
6. Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana - Keluaran = Para Penyandang Cacat dapat Berdayaguna. - Hasil =Meningkatnya Kemandirian dan KualitasHidup para Penyandang Cacat 	20 Orang Penyandang Cacat (PACA)	75 %
7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Petugas Kebersihan/Tukang Cat - Keluaran = Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharadengan baik. - Hasil = Meningkatnya Penghargaan kepada para Pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan. 	1 Unit TMP dan 1 Unit Taman Bahagia	100 %
8. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Karang Taruna/Orsos - Keluaran =Terciptanya KarangTaruna yang Trampil dan Mandiri. - Hasil = Meningkatnya Keterampilan Karang Taruna. 	2 Karang Taruna	75 %
9. Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan =Dana, Narasumber, Bahan Penyuluhan - Keluaran =PMKS dapat mengetahui Program Dinas Kesejahteraan Sosial - Hasil = PMKS mengerti tentang Program yang ada di Dinas Kesejahteraan Sosial 	5 Kecamatan perwakilan	75 %

Dengan melihat Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone pada Tahun lalu (Tahun 2013) capaian kinerjanya adalah **95,00%** dari semua kegiatan maka pelaksanaan Program dan Kegiatan masih dapat dikatakan **berhasil**. (Untuk Melihat capaian Hasil Realisasi Keuangannya dapat dilihat pada lampiran)

3. Tahun 2015

Khusus untuk tahun 2015, Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan disahkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 yang menjadi skala prioritas dapat dilihat sebagai berikut :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin.	<div>- Masukan = Dana, Narasumber</div> <div>- Keluaran = Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin</div> <div>- Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin</div>	8 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 100 %
2. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	<div>- Masukan = Dana, Narasumber</div> <div>- Keluaran = Berkurangnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bone</div> <div>- Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bone</div>	27 Kecamatan 100 %
3. Pemutakhiran Data PMKS Terpilah berbasis Jender	<div>- Masukan = Dana, Perangkat Komputer, Tenaga Pendata.</div> <div>- Keluaran = Terdatanya para PMKS dan PSKS</div> <div>- Hasil = Tersedianya data para PMKS dan PSKS</div>	27 Kecamatan 100 %
4. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	<div>- Masukan = Dana, Perangkat Komputer, Tenaga Operator. Website</div> <div>- Keluaran = Tersedianya Website Dinas</div> <div>- Hasil = Terselenggaranya system Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI)</div>	1 Website 100%
5. Penanganan Masalah – Masalah yang menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	<div>- Masukan = Dana, Mobil Operasional, Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</div> <div>- Keluaran = Tertanganinya orang/masyarakat yang terkena bencana secara maksimal serta Pemberian Tali Asih bagi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</div> <div>- Hasil = Tertanggulangnya Masyarakat yang terkena bencana dan meningkatnya kinerja Taruna Siaga Bencana (TAGANA)</div>	90 % 40 Orang TAGANA dan Daerah yang terkena Bencana

6. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran= Terbina dan Terlatihnya Anak Terlantar. - Hasil = Meningkatnya Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 	Peserta Bimbingan Sosial 15 Orang Anak Terlantar dan 4 Paket Bantuan	100 %
7. Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana - Keluaran = Para Penyandang Cacat dapat Berdayaguna. - Hasil =Meningkatnya Kemandirian dan KualitasHidup para Penyandang Cacat 	Bimbingan Sosial 25Orang Penyandang Cacat (PACA)/ 15 orang Laki-laki dan 10 orang perempuan Serta 9 paket bantuan	75 %
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Petugas Kebersihan/Tukang Cat - Keluaran = Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharadengan baik. - Hasil = Meningkatnya Penghargaan kepada para Pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan. 	1 Unit TMP	100 %
9. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Karang Taruna/Orsos - Keluaran =Terciptanya KarangTaruna yang Trampil dan Mandiri. - Hasil = Meningkatnya Keterampilan Karang Taruna. 	6 Karang Taruna/ Orsos	75 %
10. Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan =Dana, Narasumber, Bahan Penyuluhan - Keluaran =PMKS dapat mengetahui Program Dinas Kesejahteraan Sosial - Hasil = PMKS mengerti tentang Program yang ada di Dinas Kesejahteraan Sosial 	5 Kecamatan perwakilan wilayah	75 %

4. Tahun 2016

Khusus untuk tahun 2015, Program dan Kegiatan yang disusun berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD) dan

disahkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2015 yang menjadi skala prioritas dapat dilihat sebagai berikut :

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA		CAPAIAN	
1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung bagi Keluarga Miskin - Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga Fakir Miskin 	11 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	100 %	11 Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	100 %
2. Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Berkurangnya Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bone - Hasil = Meningkatnya Kesejahteraan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bone 	27 Kecamatan	100 %	27 Kecamatan	100 %
3. Penyusunan Profil Data Jender PMKS	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Perangkat Komputer, Tenaga Pendata. - Keluaran = Terdatanya para PMKS dan PSKS - Hasil = Tersedianya data para PMKS dan PSKS 	27 Kecamatan	100 %	27 Kecamatan	100 %
4. Penanganan Masalah – Masalah yang menyangkut Tanggap Cepat dan Kejadian Luar Biasa (KLB)	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Mobil Operasional, Taruna Siaga Bencana (TAGANA) - Keluaran = Tertanganinya orang/masyarakat yang terkena bencana secara maksimal serta Pemberian Tali Asih bagi TAGANA - Hasil = Tertanggulangnya Masyarakat yang terkena bencana dan meningkatnya kinerja TAGANA 	40 Orang TAGANA dan Daerah yang terkena Bencana	100 %	40 Orang TAGANA dan Daerah yang terkena Bencana	100 %
5. Pelayanan Sosial Lanjut Usia	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran = Terpenuhinya Kesejahteraan Lanjut Usia - Hasil = Meningkatnya Kualitas Hidup Lansia 	Peserta Bimbingan Sosial 15 Orang Lansia dan 3Paket Bantuan	100 %	Peserta Bimbingan Sosial 15 Orang Lansia dan 3Paket Bantuan	100 %

6. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber - Keluaran= Terbina dan Terlatihnya Anak Terlantar. - Hasil = Meningkatnya Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar 	Peserta Bimbingan Sosial 15 Orang Anak Terlantar dan 3 Paket Bantuan	100 %	Peserta Bimbingan Sosial 15 Orang Anak Terlantar dan 3 Paket Bantuan	91,37 %
7. Pendayagunaan Penyandang Cacat dan Eks Trauma.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana - Keluaran = Para Penyandang Cacat dapat Berdayaguna. - Hasil = Meningkatnya Kemandirian dan Kualitas Hidup para Penyandang Cacat . 	Bimbingan Sosial 25 Orang Penyandang Cacat (PACA)/ 15 orang Laki-laki dan 10 orang perempuan Serta 5 paket bantuan	100%	Bimbingan Sosial 25 Orang Penyandang Cacat (PACA)/ 15 orang Laki-laki dan 10 orang perempuan Serta 5 paket bantuan	100 %
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Petugas Kebersihan/Tukang Cat - Keluaran = Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpeliharadengan baik. - Hasil = Meningkatnya Penghargaan kepada para Pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan. 	1 Unit TMP	100 %	1 Unit TMP	100 %
9. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Karang Taruna/Orsos - Keluaran = Terciptanya Karang Taruna yang Trampil dan Mandiri. - Hasil = Meningkatnya Keterampilan Karang Taruna. 	2 Karang Taruna/ Orsos	100 %	1 Karang Taruna/ Orsos	50 %
10. Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Masukan = Dana, Narasumber, Bahan Penyuluhan - Keluaran = PMKS dapat mengetahui Program Dinas Kesejahteraan Sosial - Hasil = PMKS mengerti tentang Program yang ada di Dinas Kesejahteraan Sosial 	5 Kecamatan perwakilan wilayah	100%	5 Kecamatan perwakilan wilayah	100 %

Dengan penetapan Program dan Kegiatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 yang sementara berjalan diharapkan dapat tercapai dengan baik sehingga Sasaran dan Tujuan Program dapat terpenuhi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Dalam penyusunan setiap perencanaan Progran dan Kegiatan, ada tujuan dan sasaran yang akan dicapai karena tanpa tujuan dan sasaran, maka proses perencanaan tidak akan berjalan maksimal. Sehingga perlu adanya penetapan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

A. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan pada rencana kerja ini adalah :

1. Meningkatkan pemberdayaan serta sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan dan memantapkan sistem koordinasi, sinkronisasi dan informasi kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan dan memantapkan kemitraan serta peran aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial serta kesenjangan.
4. Mewujudkan organisasi sosial kemasyarakatan yang berdayaguna dan berhasil guna.
5. Meningkatkan sistem nilai dan sikap sosial individu dalam mendukung usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial.

B. Sasaran

Dengan mengacu pada tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya penghasilan dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Teratasinya permasalahan kesejahteraan sosial secara efektif dan efisien.
3. Terciptanya stabilitas sosial masyarakat serta menurunkan kesenjangan.
4. Berkembangnya organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
5. Terwujudnya sistem nilai dan sikap sosial individu dalam mendukung usaha-usaha pembangunan.
6. Meningkatnya pelayanan tanggap cepat darurat bagi masyarakat terkena bencana.

C. Program

Adapun yang menjadi Program SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 adalah :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
3. Program Pembinaan Anak Terlantar.
4. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
5. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya).
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
8. Program Keluarga Harapan (PKH)

D. Kegiatan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari pada program yang ada maka kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2018 yaitu :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin.
2. Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan.
3. Pemberian Penghargaan bagi Siswa dari RTSM Berprestasi.
4. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi.
5. Bantuan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta.
6. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan.
7. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan.
8. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin.
9. Penyusunan Profil Data Jender PMKS.
10. Pengembangan dan Perlindungan Sosial bagi RTSM dalam mendukung PADATUO (Program Akselerasi Daerah untuk Orang Banyak)
11. Penanganan Masalah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
12. Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial melalui Program Keserasian Sosial (Penyediaan Dana Dana Pendamping/Co-Sharing)

13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.
14. Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (ASKESOS)
15. Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lansia).
16. Pemberian Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Tidak Produktif/Terlantar.
17. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar (Putus Sekolah).
18. Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
19. Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyandang Cacat Berat (Tidak Produktif).
20. Pendidikan dan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
21. Pendidikan dan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
22. Bimbingan Sosial bagi Penyandang Cacat.
23. Bimbingan Keterampilan Kerja bagi Eks Napi.
24. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
25. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak.
26. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.
27. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan.
28. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal.
29. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
30. Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)
31. Pelestarian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
32. Pemberdayaan Panti Sosial.
33. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone.
34. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP).

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Sedangkan sasaran merupakan objek yang akan menjadi fokus dalam penerapan kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Jika kedua hal ini dapat direalisasikan dengan baik, maka tujuan program dan kegiatan juga akan tercapai secara maksimal. Adapun yang menjadi indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA SKPD yang tertuang pada Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone pada Tahun 2018 adalah:

1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin sebanyak 18 kelompok yang tersebar di Desa Laoni dan Kelurahan Cenrana Kecamatan Cenrana, Desa Mattampa Waliè Kecamatan Lamuru, Desa Sugiale dan Desa Cempniga Kecamatan Barebbo, Desa Ajangpulu dan Desa Awo Kecamatan Cina dan tersebar di Kabupaten Bone.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan bagi Keluarga Harapan yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.
3. Terlaksananya Kegiatan Bantuan bagi Siswa dari RTSM yang berprestasi di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.
4. Terlatihnya Wanita Rawan Sosial Ekonomi sebanyak 205 Orang yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.
5. Tersedianya Layanan Jaminan Hidup bagi Eks Kusta sebanyak 500 KK di Dusun Lerang II Desa Abbumpungeng Kec. Cina melalui alokasi dana Bansos.
6. Tertanggulangnya Kemiskinan Pedesaan sebanyak 800 KK di Kecamatan Cina, Kajuara, Sibuluè, Barebbo, Patimpeng, Bontocani, Tellu Siattingngè, dan Kecamatan Mare.
7. Tertanggulangnya Kemiskinan Perkotaan sebanyak 550 KK di Kecamatan Tanètè Riattang, Tanètè RiattangBarat, Tanètè Riattang Timur, dan Palakka.

8. Terlatihnya Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin yang tersebar di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.
9. Tersusunnya Profil Data Jender PMKS di Kabupaten Bone
10. Terciptanya Model Penanggulangan Kemiskinan Daerah secara Terpadu di 27 Kecamatan di Kabupaten Bone.
11. Tertanganinya Masyarakat yang terkena Bencana segera maksimal pada wilayah yang mengalami Bencana di Kabupaten Bone.
12. Terciptanya Kekeragaman Sosial di Masyarakat yang terjadi konflik sosial di Kabupaten Bone
13. Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Korban Bencana di Kabupaten Bone.
14. Tersedianya Jaminan Perlindungan bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran di Kabupaten Bone.
15. Terciptanya Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia yang ada di Kabupaten Bone.
16. Terpenuhinya Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Terlantar/Tidak Produktif di Kabupaten Bone.
17. Terbina dan Terlatihnya Anak Terlantar yang mengikuti bimbingan keterampilan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Selatan.
18. Penyandang Cacat dapat Berdaya Gunayang mengikuti pelatihan keterampilan kerja di Kabupaten Bone.
19. Terpenuhinya Jaminan Hidup bagi Penyandang Cacat Berat yang Tidak Produktif yang ada di Kabupaten Bone.
20. Terdidik dan Terlatihnya Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
21. Terlatihnya Keterampilan Usaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial yang ada di Kabupaten Bone.
22. Terbina dan Terlatihnya Penyandang Cacat.
23. Terbina dan Terlatihnya para Eks Napi yang ada di Kabupaten Bone.
24. Terbagunnya Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Sangat Miskin di Kabupaten Bone
25. Adanya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Anak di Kabupaten Bone.
26. Adanya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Korban Penyalahgunaan Napzadi Kabupaten Bone.

27. Adanya Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Orang Cacat di Kabupaten Bone.
28. Terlatihnya Anak Terlantar termasuk anak jalanan, anak Cacat dan Anak nakal di Kecamatan Tanètè Riattang, Tanètè Riattang Barat dan Tanètè Riattang Timur.
29. Meningkatnya Usaha-usaha bagi Anggota Karang Taruna bagi Karang Taruna Berprestasi dan perwakilan Karang Taruna yang mengikuti Lomba Desa/Kelurahan, P2WKSS, Desa Siaga, Tingkat Propinsi Sulawesi Selatan.
30. Meningkatnya kapasitas Pelaku-Pelaku Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bone
31. Terbangunnya Sarana dan Terbinanya Manajemen LK3 Kabupaten Bone yang terdapat Di Kelurahan Jeppe'è Kecamatan Tanètè Riattang Barat Watampone.
32. Terselenggaranya Pemberdayaan Panti Sosial sebanyak 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/Panti Sosial yang terdapat di Kecamatan Tanètè Riattang dan Tanètè Riattang Timur Kabupaten Bone.
33. Terbangunnya Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watampone di Kelurahan Biru Kecamatan Tanètè Riattang Kabupaten Bone.
34. Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Bone.

BAB V

DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Berdasarkan Indikator Kinerja tersebut di atas beserta kelompok sasaran yang ingin dicapai, maka dana indikatif beserta sumbernya untuk digunakan pada tahun anggaran 2018 selain diharapkan bersumber dari dana alokasi APBD, juga diharapkan ada dana sharing melalui dana dekonsentrasi, dana hibah atau dana lainnya dari alokasi APBN melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan prakiraan rincian anggaran masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha bagi Keluarga Fakir Miskin dengan pagu indikatif **Rp. 210.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
2. Koordinasi dan Pelayanan bagi Keluarga Harapan dengan pagu indikatif **Rp. 825.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD II sebagai dana pendamping untuk Program Keluarga Harapan (PKH).
3. Pendataan/ Pemutakhiran data Terpadu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial dengan pagu indikatif **Rp. 270.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD II
4. Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi dengan pagu indikatif **Rp. 95.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
5. Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial dengan pagu indikatif **Rp. 120.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
6. Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan, Perkotaan dan Pesisir dengan pagu indikatif **Rp. 150.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
7. Penanganan dan Pemberdayaan komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Masyarakat Terpencil Lainnya dengan pagu indikatif **Rp.**

- 75.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
8. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskindengan pagu indikatifRp. 90.664.350,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
 9. Penanganan Masalah-masalah yang menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa(KLB) dengan pagu indikatifRp. 130.000.000,-yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
 10. Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial melalui Program Keserasian Sosial (Penyediaan Dana Dana Pendamping/ *Co-Sharing*) dengan pagu indikatif Rp. 196.000.000,- yang diharapkan dana pendampingnya dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II dan Dana Keserasian sosial per Desa itu dialokasikan dari APBN.
 11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alamdengan pagu indikatif Rp. 1.500.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBN.
 12. Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (ASKESOS)dengan pagu indikatif Rp. 216.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBN.
 13. Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan dengan pagu indikatif Rp. 52.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD II
 14. Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Lansia)dengan pagu indikatif Rp. 75.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD II dan/atau APBD I.
 15. Pemberian Jaminan Hidup bagi Lanjut Usia Tidak Produktif/Terlantardengan pagu indikatif Rp. 500.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBN.

16. Pengembangan Bakat dan Keterampilan Anak Terlantar dengan pagu indikatif Rp. 94.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
17. Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan pagu indikatif Rp. 99.500.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
18. Pemberian Jaminan Hidup bagi Penyandang Cacat Berat (Tidak Produktif) dengan pagu indikatif Rp. 500.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBN.
19. Pendidikan dan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma dengan pagu indikatif Rp. 98.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBN.
20. Pendidikan dan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial dengan pagu indikatif Rp. 137.200.000,- yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBD II.
21. Bimbingan Sosial bagi Penyandang Cacat dengan pagu indikatif Rp. 125.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD I.
22. Bimbingan Keterampilan Kerja bagi Eks Napid dengan pagu indikatif Rp. 100.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD I.
23. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan pagu indikatif Rp. 1.050.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBN.
24. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak dengan pagu indikatif Rp. 25.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD I.
25. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dengan pagu indikatif Rp. 70.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD I.
26. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan dengan pagu indikatif Rp. 1.000.000.000,- yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBN.

27. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakaldengan pagu indikatif **Rp. 210.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBN.
28. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakatdengan pagu indikatif **Rp. 190.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
29. Penyuluhan Masalah Kesejahteraan Sosialpagu indikatif **Rp. 250.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
30. Pemberdayaan Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan pagu indikatif **Rp. 250.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.
31. Pelestarian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)dengan pagu indikatif **Rp. 490.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBN.
32. Pemberdayaan Panti Sosialdengan pagu indikatif **Rp. 125.014.285,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD I.
33. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP) Watamponedengan pagu indikatif **Rp. 352.800.000,-** yang diharapkan dapat tertangani melalui alokasi dana APBD I dan/atau APBD II.
34. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan (TMP)dengan pagu indikatif **Rp. 99.000.000,-** yang diharapkan dapat tertangani sepenuhnya melalui alokasi dana APBD II.

BAB VI

SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan mempertimbangkan sumber dana dari APBD II sangat terbatas alokasinya dalam menjalankan program/kegiatan yang ada, maka untuk lebih menjamin kelancaran pelaksanaan program sangat diharapkan adanya sumber dana, baik yang bersumber dari alokasi APBD I maupun alokasi APBN yang jumlahnya lebih besar berupa penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dikatakan bahwa jangkauan pelayanan atas penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan dapat melampaui satu wilayah administrasi pemerintah propinsi. Dengan demikian diharapkan kucuran dana untuk untuk membiayai program/kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan agar nantinya seluruh program/kegiatan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 dibuat untuk menjadi pedoman dalam rangka penyusunan RKA-DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 kelak.

Apabila masih ada kekurangan dalam penulisan Rencana Kerja ini, diharapkan adanya pembinaan lebih lanjut baik mengenai kata perkata maupun dalam penyusunan sistematika penulisan serta substansi dari Rencana Kerja ini demi mewujudkan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan guna Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang seutuhnya yang akan menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Bone 2013-2018 yakni **“Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera”**.